

TESIS

**PEMBERIAN CUTI BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA
BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2013
DIKAITKAN DENGAN HAM**



Disusun Oleh :

DIMAS DWI ADHITAMA

NIM : 12112041

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2014

ABSTRAKSI

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.

Pembinaan kepada narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui Cuti Bersyarat, berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yaitu Cuti Bersyarat bagi Narapidana bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan ketentuan Cuti Bersyarat bagi Narapidana relevan dengan Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian yang penulis gunakan melalui pendekatan, yuridis normatif dengan menggunakan, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dan tehnik bahan hukum.

Kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari penulisan Tesis dengan judul “PEMBERIAN CUTI BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2013 DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA”. yaitu Pemberian Cuti Bersyarat tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena Cuti Bersyarat dapat meringankan hukuman bagi warga binaan Pemasyarakatan sebelum masa pidana berakhir, yang telah memenuhi syarat : dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Yang di atur dalam Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan Cuti Bersyarat sudah relevan dengan Hak Asasi Manusia, adapun Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka pembinaan Narapidana di dalam LAPAS / RUTAN dan juga di luar LAPAS / RUTAN .Cuti Bersyarat itu merupakan salah satu wujud dari pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang pelaksanaannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai akhir dari segala uraian, saya mencoba untuk memberikan saran yang yang dapat saya kemukakan yaitu harus di ciptakan suatu kerjasama yang harmonis antara Warga Binaan dengan Petugas Pemasyarakatan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif. Dan peneliti prihatin dengan ketidakjelasan sistem pemidanaan oleh Penegak Hukum di Negara ini sehingga terjadi kelebihan kapasitas (over capacity) LAPAS RUTAN. Pemmasalahan kelebihan kapasitas harus di tangani secara sistematis. Salah satunya adalah dengan peningkatan Cuti Bersyarat bagi Narapidana.

Kata kunci : Cuti bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan, Over kapasitas.

ABSTRACT

Prisoners as human beings and must be treated well and humanely in an integrated development system; treatment of prisoners by the prison system is not in accordance with the penal system based on Pancasila and the Constitution of 1945, which is the final part of the criminal system.

Guidance to prisoners held by Corrections transform and realize these goals through a Conditional leave, based on the background and the description above, it can be the problem formulation for Inmates Leave Conditional contrary to the Human Rights and conditions for inmates leave Conditional relevant to Human Rights.

The research method used by the writer through the approach, the source material that covers the law baahan primary law, secondary law, tertiary legal materials, collection procedure and law material treatment and law material method.

Conclusions and suggestions that can be drawn from the writing of thesis with the title "CONDITIONAL GRANT OF LEAVE TO PRISONERS BY THE MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS REGULATION NUMBER 21 YEAR 2013 associated with HUMAN RIGHTS". The granting of leave is Besyarat not conflict with human rights as a Conditional leave to ease penalties for correctional inmates before the criminal end, which has been qualified: shall be punished with imprisonment of 1 (one) year 3 (three) months; had undergone at least 2/3 (two-thirds) during criminal; and good character within 6 (six) months. Which is set in the Law on Penitentiary.

Conditional leave provisions have been relevant to human rights, as for Human Rights is a very important part in order to develop Inmates at the prisons / detention and also outside of prisons / detention Conditional .Cuti it is one form of coaching outside of the Penitentiary implementation is based on the rule of law in Indonesia.

As the end of every description, I tried to give advice that I can point out the need in creating a harmonious cooperation between Citizens Patronage with Correctional Officer in accordance with the Human Rights so as to create a conducive atmosphere. And researchers concerned with the vagueness criminal system by law enforcement in this country so that there is excess capacity (over capacity) prisons crease. Things are excess capacity must be handled systematically. One way is to increase the Conditional leave for Inmates.

Keywords : conditional leave, Prison, Over capacity.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi.....	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Ringkasan.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
4.1 Secara Teoritis.....	8
4.2 Secara Praktis.....	8
5. Tinjauan Pustaka.....	9
5.1. Hak Asasi Manusia.....	9
5.2. Narapidana.....	10
5.3. Cuti Bersyarat.....	10
6. Metode Penelitian.....	12
6.1. Pendekatan Masalah.....	13
6.2. Sumber Bahan Hukum.....	13

6.2.1. Bahan Hukum Primer.....	13
6.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	13
6.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	15
6.2.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum...	15
6.2.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	15
7. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA

1. Pemberian Cuti Bersyarat berdasarkan Hak Asasi Manusia.....	18
2. Cuti Bersyarat Menurut Undang - Undang Pemasarakatan.....	22
3. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.....	26
4. Wali Pemasarakatan.....	28
5. Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan	31
6. Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.....	33

BAB III KETENTUAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M.01.PK04-10 TAHUN 2007 DENGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 21 TAHUN 2013 DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

1. Syarat- syarat Cuti Bersyarat.....	39
2. Tata Cara Pemberian Cuti Bersyarat.....	43
3. Izin Ke Luar Negeri.....	44
4. Pembatalan dan Pencabutan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.....	46
5. Pencabutan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.....	46
6. Penghitungan Masa Pidana.....	50
7. Pengaturan Cuti Bersyarat dalam kaitannya dengan HAM.....	52
8. Pengaturan Cuti Bersyarat yang relevan dengan prinsip – prinsip dasar HAM.....	53
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	55
2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
▪ Alur Informasi Pelayanan Cuti Bersyarat	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir dari penulisan Tesis ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Cuti Bersyarat sudah relevan dengan HAM, adapun HAM merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka pembinaan Narapidana di dalam LAPAS / RUTAN dan juga di luar LAPAS / RUTAN .Cuti Bersyarat itu merupakan salah satu wujud dari pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang pelaksanaannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Terdapat perbedaan permohonan Cuti Bersyarat bagi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04 – 10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat berdasarkan :

- a. Masapidana yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;*

- b. *Reward Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan menjadi 4 (empat) bulan.*

Berdasarkan perbedaan ini maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat lebih manusiawi / lebih sesuai dengan prinsip – prinsip dasar HAM. Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04 – 10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

B. Saran

Adapun saran yang dapat saya kemukakan yaitu :

1. Ketentuan Cuti Bersyarat yang berlaku saat ini harus tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan HAM.
2. Agar Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dapat diimplementasikan dengan baik agar narapidana memperoleh manfaat yang sesuai dengan HAM dari adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adi sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta : Montasad, 2004.

Goran Melander, dkk., (ed), alih bahasa : Madayuti Petiwi (dkk), edisi revisi, *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute*, Brill Academic Publishers 2004.

Hadi Setiadi Tunggal (ed.), *UU Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta : Harvarindo, 2000.

H Utsman Surur. *Dasar-Dasar HAM, Bahan kuliah diklat HAM*, Jakarta : Direktorat Jenderal HAM, 2008.

Rachsobawono,R, *Peranan Perusahaan dalam membantu Memasyarakatkan kembali Narapidana*, Pengayoman, 23 Desember 1983.

Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman; University of Oklahoma Press, 1991.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan*

Undang - undang RI Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang HAM*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2013 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 2007 *Tentang Wali Pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*